RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN REJOSO

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rejoso Tahun 2025-2029 Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Rejoso, 3 Oktober 2025

CAMAT REJOSO

TEGUH OVI ANDRIYANTO,SIP
PEMBINA TK I
NIP.197309061993031006

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

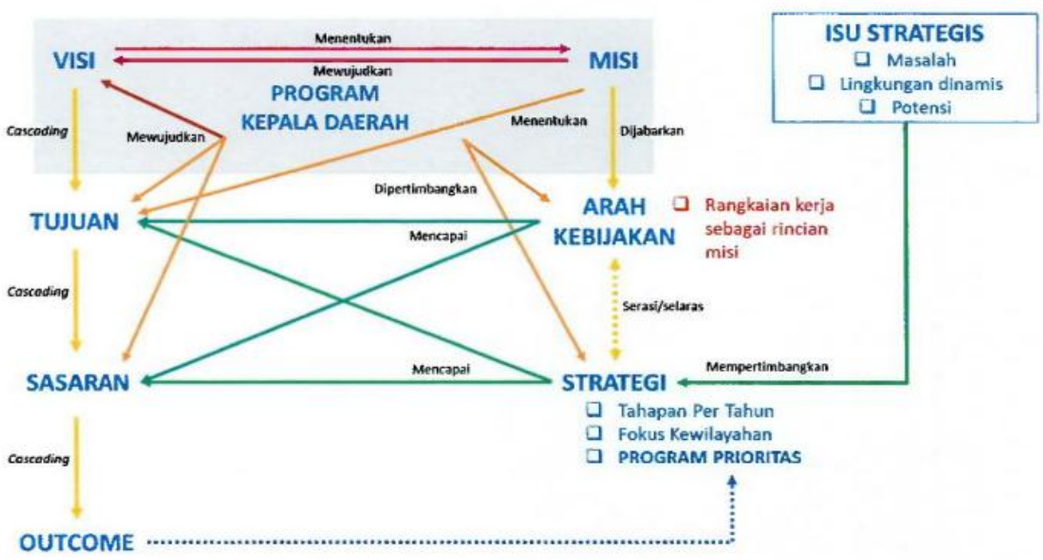
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)*melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)*atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Bagan Konsep Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/ serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI”;
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sumber: "
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isustrategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran Kabupaten NganjukTahun 2025-2029 sesuai tugaspokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalamkurunwaktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

b. Sumber Daya Perangkat Daerah;

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya

d. Kelompok Sasaran Layanan;

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;

f. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah;

g. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah;

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah

a. Identifikasi Permasalahan;

b. Perumusan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah;

3.2. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencvapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat

Daerah; dan

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Data Geografis

Kecamatan Rejoso merupakan salah satu kecamatan di KabupatenNganjuk yang terletak di bagian utara dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Rejoso terletak pada koordinat 111˚ 32’ 30” BT dan 7˚ 32’ 30” LS.

Batas wilayah Kecamatan Rejoso, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Kecamatan Bagor, sebelah timur Kecamatan Gondang dan Kecamatan Ngluyu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bagor.

Luas wilayah Kecamatan Rejoso adalah 2.665.777,54 Ha yang terdiri dari tanah pertanian seluas 736.161,84 Ha (27,61%), tanah pekarangan yang digunakan untuk bangunan seluas 1.682.302,35 Ha (%) dan perkebunan seluas 6.578,46 Ha (8,32%), wilayah hutan seluas 3.061.833,97 Ha (40,07%) dan 180.132,67 Ha (1,72%) untuk lainnya seperti makam, jalan, sungai. dll.



Data Kependudukan

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Rejoso

No	Desa/Kelurahan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	SIDOKARE	1.612	1.679	3.291
2	SUKOREJO	1.500	1.519	3.019
3	MUNGKUNG	1.723	1.685	3.408
4	GEMPOL	1.194	1.100	2.294
5	PUHKEREP	2.586	2.670	5.256
6	MLORAH	3.635	3.668	7.303
7	JATIREJO	1.167	1.157	2.324
8	KLAGEN	2.252	2.230	4.482
9	SETREN	1.133	1.121	2.254
10	MOJOREMBUN	2.389	2.359	4.748
11	NGADIBOYO	3.847	3.785	7.632
12	REJOSO	1.828	1.871	3.699
13	TALANG	1.235	1.215	2.450
14	NGANGKATAN	1.818	1.865	3.683
15	T A L U N	967	1.005	1.972
16	JINTEL	1.322	1.292	2.614
17	MUSIR KIDUL	1.348	1.374	2.722
18	BANJAREJO	1.106	1.132	2.238
19	SAMBIKEREP	1.785	1.835	3.620
20	MUSIR LOR	1.634	1.631	3.265
21	WENGKAL	996	1.050	2.046
22	KEDUNG PADANG	1.011	956	1.967
23	TRITIK	591	586	1.177
24	BENDOASRI	311	323	634
	Jumlah	**38.990**	**39.108**	**78.098**

2.1 Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Rejoso.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

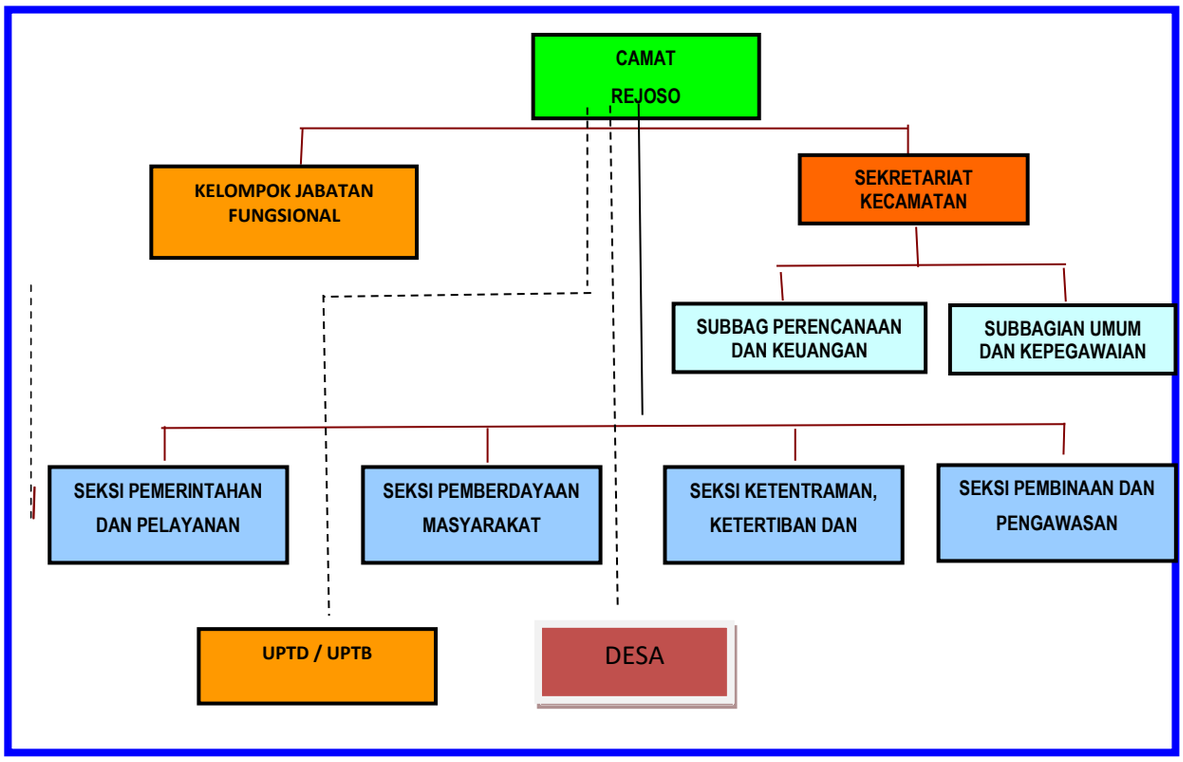
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa / kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum**

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;

k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Kecamatan Rejoso

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

1.1 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Rejoso sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 5 (lima) jabatan struktural dan 3 (tiga) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 9 (Sembilan) orang staf.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor KecamatanRejoso
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	SekretarisKecamatan	1
3.	Kepala Seksi	3
4.	Kasubbag	0
5.	Staf/PNS	11
6.	NON ASN	4
	Jumlah	**20**

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	3
3.	Penata	III/c	-
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5.	Penata Muda	III/a	5
6.	PengaturTk.I	II/d	4
7.	Pengatur Muda	II/a	1
8.	Non PNS	-	4
Jumlah			20

3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor KecamatanRejoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	JumlahPegawai
1.	S2	1
2.	S1	5
3.	D3	-
4.	SMA	14
5.	SMP	-
	JUMLAH	20

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :

- Roda empat - (-) unit terdiri dari :
  - 1 Unit Toyota Veloz Tahun 2024
- Roda dua 38 (Tiga puluh enam) unit terdiri dari :
  - 1 unit Yamaha VIXION Tahun 2014
  - 1 unit Honda Supra X 125 Tahun 2007
  - 1 unit Honda Win Tahun 1997
  - 1 unit Suzuki A100 Tahun 1994
  - 24 unit Honda Win Tahun 2005 (Desa)
  - 22 unit Honda VERZA Tahun 2014 (Desa)
  - 2 unit Honda Supra X 125 tahun 2014 (1 Desa Kades Perempuan)

4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 24 buah
- Meja Panjang Pelayanan : 1 Set
- Kursi Rapat : 100 buah
- Bangku rapat Panjang : 3 buah
- Kursi Tamu : 3 Set
- Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP (depdagri) : 1(satu)unit
- Laptop : 5 (lima) unit,
- Komputer : 6 (enam) unit
- Printer : 10 (sepuluh) unit
- Telepon : 1 (satu) unit
- Rak Kayu : 4 (empat) unit
- Filing besi : 3 (tiga) unit

- Brangkas : 1 (satu)
- Lemari Slorok : 2 (dua) unit
- Papan visuil : 2 (dua) unit
- Lemari kayu : 8 (delapan) unit
- Lemari besi : 2 (dua) unit
- Ac : 7 (tujuh) unit
- Sound system : 2 (dua) unit
- Power supl : 2 (dua) unit
- Mimbar Podiuq : 1 (satu) unit
- CCTV : 5 (lima) unit
- Kipas angin : 12 (dua belas) unit.

5. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 17 buah
- Meja layanan : 1 set
- Kursi : 100 buah
- Bangku Panjang : 5 buah
- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 1 (satu) unit
- Laptop : 4 (empat) unit
- Mesin Ketik : 1 (satu) unit
- Printer : 7 (tujuh) unit

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rejoso dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan

6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat				82%	86 %	86%	82%	75%	83,4 %	85 %	88,85	93,66	92,22	1,01	1,05	1,069	1,11	1,22
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan.				100 %	100 %	100 %	100%	100%	90 %	99,6 %	32,19	80 %	70 %	0,7	0,8	0,946	0,8	0,7
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				100 %	100 %	100 %	100%	90%	78 %	79,2 %	82,91 %	91 %	88 %	0,7	0,8	0.984	0.91	0,97
4	Prosentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertibanumum yang dilaksanakan				100 %	100 %	100 %	100%	100%	50 %	50,3 %	57,52	80 %	74,33 %	0,5	0,53	0,873	0,8	0,74
5	Prosentase warga / lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan				100 %	100 %	100 %	100%	100%	-	-	96,66	100 %	72,86 %	-	-	0,912	0,72	0,72

6	Prosentase Kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasanpemerintahandesa.						100 %	100%	100%			75,61	100 %	59,35 %			0,910	0,59	0,59

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2024

Tabel. 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Target Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	*3.088.052,415*	2.889.962.989	*3.421.994.246*	2.254.793,462	2.241.457.266	2.365.116.169	73,02 %	0,77	0,69	12 %	5 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.490	136.138.800	*119.534.200*	28.482,5	94.347.000	129.429.100	32,19 %	0,69	1,08	42 %	268%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	132.785,3	127.568.800	*176.988.600*	110.096	118.519.300	221.513.400	82,91 %	0,92	1,25	35 %	95%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.600	66.862.050	*50.315.200*	12.425	56.283.400	39.098.000	57,52 %	0,84	0,77	185 %	322%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600	100.252.200	*146.810.200*	114.897,2	95.647.000	129.107.800	96,66 %	0,95	0,87	411%	18
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.800	24.675.000	*69.262.600*	14.970	15.936.000	44.537.500	75,61 %	0,06	0,64	205 %	186%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
KategorisasiPredikatCapaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.1., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Rejoso.

Sedangkan pada table 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2024, rasio antara anggaran dan realisasi pada predikat Tinggi dan sangat Tinggi tidak ada yang rendah bahkan sangat rendah. Hal ini bisa terjadi karena kerjasama yang baik dari semua pegawai.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Rejoso

No	Desa	PAUD/ TK	SD/MI	SMP/ MTS	SMA/MA/ SMK	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar /Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Sidokare	1/1	2	-	1	-	-	-	-	1
2	Sukorejo	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Mungkung	1/3	2	-	-	-	-	-	-	1
4	Gempol	1/1	1	-	-	-	-	-	-	1
5	Puhkerep	1/3	2	-	-	-	-	-	-	-
6	Mlorah	2/4	3	1	-	-	-	-	-	-
7	Jatirejo	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Klagen	1/1	2	-	-	-	-	-	-	-
9	Setren	1/2	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Mojorembun	1/1	2	1	-	-	-	-	-	1
11	Ngadiboyo	1/2	3	-	-	-	-	-	-	1
12	Rejoso	1/2	3	-	-	-	-	-	-	1
13	Talang	1/1	1	-	-	-	-	-	-	1
14	Ngangkatan	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
15	Talun	1/1	1	1	1	-	-	-	-	-
16	Jintel	2/2	2	-	-	-	-	-	-	1
17	Musir Kidul	1/2	1	-	-	-	-	-	-	-
18	Banjarejo	1/1	1	1/1	-	-	-	-	-	-
19	Sambikerep	2/2	2	-	-	-	-	-	-	1
20	Musir Lor	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Wengkal	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Kegdungpadang	1/1	1	-		-	-	-	-	-
23	Tritik	1/1	1	1	-	-	-	-	-	-
24	Bendoasri	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kasi Pemerintahan dan Pelayaan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Rejoso

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Sidokare	-	-	-	-	1	-
2	Sukorejo	-	-	-	1	-	-
3	Mungkung	-	-	-	-	1	-
4	Gempol	-	-	-	-	1	-
5	Puhkerep	-	-	-	-	1	-
6	Mlorah	-	-	-	1	-	-
7	Jatirejo	-	-	-	-	1	-
8	Klagen	-	-	-	1	-	-
9	Setren	-	-	-	-	1	-
10	Mojorembun	-	-	-	1	-	-
11	Ngadiboyo	-	-	-	-	1	-
12	Rejoso	-	-	-	-	-	2
13	Talang	-	-	1	-	1	1
14	Ngangkatan	-	-	-	-	1	-
15	Talun	-	-	-	-	1	-
16	Jintel	-	-	-	1	-	-
17	Musir Kidul	-	-	-	-	1	-
18	Banjarejo	-	1	-	-	1	-
19	Sambikerep	-	-	-	-	1	-
20	Musir Lor	-	-	-	1	-	-
21	Wengkal	-	-	-	-	1	-
22	Kegdungpadang	-	-	-	-	1	-
23	Tritik	-	-	-	-	1	-
24	Bendoasri	-	-	-	-	1	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Rejoso

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Sidokare	19	9	7	11	1	1	31
2	Sukorejo	23	6	5	12	1	1	31
3	Mungkung	18	9	7	11	1	1	31
4	Gempol	8	4	5	8	1	1	31
5	Puhkerep	19	5	8	11	27	21	30
6	Mlorah	36	14	9	5	1	1	31
7	Jatirejo	15	6	5	9	30	14	31
8	Klagen	18	6	7	9	39	20	32
9	Setren	18	3	5	11	1	1	31
10	Mojorembun	18	6	7	10	1	1	31
11	Ngadiboyo	37	12	9	11	1	1	31
12	Rejoso	28	10	7	7	1	1	31
13	Talang	15	3	5	9	13	8	31
14	Ngangkatan	21	6	5	5	1	1	31
15	Talun	16	4	5	7	33	17	31
16	Jintel	12	6	5	5	60	14	31
17	Musir Kidul	16	6	5	11	1	1	31
18	Banjarejo	7	2	5	10	28	1	31
19	Sambikerep	23	7	7	11	1	1	31
20	Musir Lor	18	6	5	11	26	18	31
21	Wengkal	14	4	5	9	44	1	31
22	Kegdungpadang	14	6	5	8	1	1	31
23	Tritik	7	3	5	12	10	11	23
24	Bendoasri	6	2	5	10	1	1	31

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Rejoso

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Sidokare	1	-	-	-	1	-
2	Sukorejo	1	-	-	-	1	-
3	Mungkung	1	-	1	-	1	-
4	Gempol	1		-	-	1	-
5	Puhkerep	1	-	-	-	1	-
6	Mlorah	1	-	-	-	1	-
7	Jatirejo	1	-	-	-	1	-
8	Klagen	1	-	-	-	1	-
9	Setren	1	-	-	-	1	-
10	Mojorembun	1	-	-	-	1	-
11	Ngadiboyo	1	-	1	-	1	-
12	Rejoso	1	-	1	1	1	-
13	Talang	1	1	-	1	1	-
14	Ngangkatan	1	-	-	-	1	
15	Talun	1	-	-	-	1	-
16	Jintel	1	-	-	-	1	-
17	Musir Kidul	1	-	-	-	1	-
18	Banjarejo	1	-	-	-	1	-
19	Sambikerep	1	-	-	-	1	-
20	Musir Lor	1	-	-	-	1	-
21	Wengkal	1	-	-	-	1	-
22	Kegdungpadang	1	-	-	-	1	
23	Tritik	1	-	-	-	1	-
24	Bendoasri	1	-	-	-	1	-

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Rejoso

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung/ Bendungan
1	Sidokare	1,8	-	1,8	-
2	Sukorejo	1,5	-	1,5	-
3	Mungkung	1,5	1	1,5	-
4	Gempol	2,0	-	2,0	-
5	Puhkerep	2,7	2	2,7	-
6	Mlorah	6,18	2	6,18	-
7	Jatirejo	2,3	2	2,3	-
8	Klagen	2,2	1	2,2	-
9	Setren	2,0	1	2,0	-
10	Mojorembun	4,0	2	4,0	-
11	Ngadiboyo	4,3	3	4,3	-
12	Rejoso	2,3	1	2,3	-
13	Talang	1,5	2	1,5	-
14	Ngangkatan	3,4	3	3,4	1
15	Talun	3,9	1	3,9	-
16	Jintel	2,5	1	2,5	-
17	Musir Kidul	1,7	1	1,7	-
18	Banjarejo	2,0	2	2,0	-
19	Sambikerep	6,5	1	6,5	1
20	Musir Lor	2,7	2	2,7	-
21	Wengkal	6,9	2	6,9	-
22	Kegdungpadang	2,6	2	2,6	-
23	Tritik	8,0	1	8,0	1
24	Bendoasri	11,0	-	11,0	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Rejoso

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Sidokare	-	1	1	1
2	Sukorejo	-	1	1	1
3	Mungkung	-	1	1	1
4	Gempol	-	1	1	1
5	Puhkerep	-	1	1	1
6	Mlorah	-	1	1	1
7	Jatirejo	-	1	1	1
8	Klagen	-	1	1	2
9	Setren	-	1	1	1
10	Mojorembun	-	1	1	2
11	Ngadiboyo	-	1	1	1
12	Rejoso	-	1	1	1
13	Talang	-	1	1	1
14	Ngangkatan	-	1	1	1
15	Talun		1	1	1
16	Jintel	-	1	1	1
17	Musir Kidul	-	1	1	1
18	Banjarejo	-	1	1	1
19	Sambikerep	-	1	1	1
20	Musir Lor	-	1	1	1
21	Wengkal	-	1	1	1
22	Kegdungpadang	-	1	1	1
23	Tritik	-	1	1	2
24	Bendoasri	-	1	1	1

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Rejoso Tahun 2024

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkelahian
1	Sidokare	-	-	-	-	-	1	-
2	Sukorejo	-	1	-	-	-	-	-
3	Mungkung	-	1	-	-	1	-	1
4	Gempol	-	1	-	-	-	-	1
5	Puhkerep	-	-	-	-	-	-	-
6	Mlorah	-	1	-	1	-	1	-
7	Jatirejo	-	-	-	-	-	-	1
8	Klagen	-	-	-	-	-	-	1
9	Setren	-	-	-	-	-	-	-
10	Mojorembun	-	-	-	-	-	1	-
11	Ngadiboyo	-	1	-	1	-	1	-
12	Rejoso	1	-	-	1	1	-	-
13	Talang	1	-	-	1	1	-	-
14	Ngangkatan	-	1-	-	-	-	-	-
15	Talun	-	-	-	-	-	-	-
16	Jintel	-	-	-	-	-	-	-
17	Musir Kidul	-	-	-	1	-	-	1
18	Banjarejo	-	-	-	-	-	-	-
19	Sambikerep	-	-	-	-	-	-	1
20	Musir Lor	-	-	-	1	-	-	-
21	Wengkal	-	1	-	-	-	-	-
22	Kegdungpadang	-	-	-	-	-	-	-
23	Tritik	-	1	-	-	-	-	-
24	Bendoasri	-	1	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Rejoso Tahun 2024

No	Desa	Jumlah Konflik social di Kec. Rejoso
1	Sidokare	-
2	Sukorejo	-
3	Mungkung	-
4	Gempol	-
5	Puhkerep	-
6	Mlorah	-
7	Jatirejo	-
8	Klagen	-
9	Setren	-
10	Mojorembun	-
11	Ngadiboyo	-
12	Rejoso	-
13	Talang	-
14	Ngangkatan	-
15	Talun	-
16	Jintel	-
17	Musir Kidul	-
18	Banjarejo	-
19	Sambikerep	-
20	Musir Lor	
21	Wengkal	-
22	Kegdungpadang	-
23	Tritik	-
24	Bendoasri	-

Sumber Data : seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Rejoso Tahun 2024

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	Sidokare	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Sukorejo	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Mungkung	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Gempol	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Puhkerep	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Mlorah	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Jatirejo	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Klagen	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Setren	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Mojorembun	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Ngadiboyo	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Rejoso	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Talang	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Ngangkatan	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Talun	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Jintel	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Musir Kidul	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Banjarejo	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Sambikerep	2	2	2	2	2	2	2	2
20	Musir Lor	2	2	2	2	2	2	2	2
21	Wengkal	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Kegdungpadang	2	2	2	2	2	2	2	2
23	Tritik	2	2	2	2	2	2	2	2
24	Bendoasri	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber Data : Seksi Binwas

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Rejoso Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Adminduk capil	2.733
2	Perijinan	-
3	Administrasi lainnya	589

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Rejoso Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	1
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	1
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	1
6	Bantuan BLT	1

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Rejoso adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Rejoso.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Rejoso dalam pemberian layanan Adalah :

1. Koramil
2. Polsek
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4. Tim Percepatan Penurunan Stanting
5. Tim UKS Kecamatan

sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas: Koordinasi dan fasilitasi .

f. **Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

- **Memberikan Dividen** : BUMD yang sehat secara finansial akan secara konsisten menyumbangkan dividen kepada kas daerah, yang menjadi salah satu sumber PAD
- **Mendukung Optimalisasi Sumber Daya Lokal** :BUMD dibentuk untuk mengelola sumber daya local yang potensial, seperti tambang

perkebunan, atau energi terbarukan, yang dapat dimaksumalkan untuk menciptakan pendapatan bagi daerah

- **Mningkatkan Daya Beli Masyarakat** : BUMD yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli Masyarakat, dan menarik investasi local

  Dengan peran BUMD yang optimal, diharapkan kinerja perangkat daerah dapat meningkat, dan daerah dapat mandiri secara fiscal

g. **Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

Kerjasama daerah Adalah usaha Bersama antara daerah dan daerah lain, serta antara daerah dan pihak ketiga, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pemenuhan pelayanan publik

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a) Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Rejoso;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Rejoso yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b) Faktor Kelemahan (Weakness)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a) Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b) Faktor Ancaman (Threat)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal	Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Rejoso, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau

evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

b. Perumusan Isu Strategis

Pada Subbab 2.6 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Rejoso, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Rejoso, yaitu:

Tabel

Teknik Merumuskan Isu Strategis Kecamatan Rejoso

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan	Peningkatan ekonomi local, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Ketahanan terhadap perubahan iklim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konflik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, di informasi dan polarisasi social, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosotan ekonomi global	Penentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitalisasi desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting, serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, infrastruktur antar wilayah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	1. Pemanfaatan ruang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. 2. Optimalisasi peran serta dan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. 3. Pelayanan Prima 4. Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah () Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rejoso dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung sasaran pembangunan daerah "**Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan".**

Adapun Tujuan Kecamatan Rejoso adalah Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

TABEL TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso											
- Meningkatnya tatakelola pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik inovatif.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	50.50	55	60	62	64	66	68	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	91.54	91.54	92	92.5	93	93.5	94	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	18.8	18.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	90	90	92	94	96	98	100	

Berdasarkan table. diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Rejoso dalam menjalankan pemerintahan:

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Rejoso dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Rejoso, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Tabel

Arah Kebijakan Kecamatan Rejoso

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	
			- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah - Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa - Meningkatkan peran	

			serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM - Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
			- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan	
			Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Rejoso selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Rejoso. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Rejoso akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN					4.318.649.857,00		4.534.582.350,00		4.761.211.470,00		4.999.377.039,00		5.249.345.893,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.456.022.757,00		3.628.823.895,00		3.810.265.090,00		4.000.778.344,00		4.200.817.261,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan (Nilai)	61	61	63	3.456.022.757,00	66	3.628.823.895,00	68	3.810.265.090,00	70	4.000.778.344,00	72	4.200.817.261,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					123.740.200,00		129.927.210,00		136.423.571,00		143.244.749,00		150.406.986,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	85	85.904.000,00	87.5	90.199.200,00	90	94.709.160,00	92.5	99.444.618,00	95	104.416.849,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	80	87.5	17.240.800,00	90	18.102.840,00	92.5	19.007.982,00	95	19.958.381,00	97.5	20.956.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	85	20.595.400,00	87.5	21.625.170,00	90	22.706.429,00	92.5	23.841.750,00	95	25.033.837,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					113.891.600,00		119.586.180,00		125.565.489,00		131.843.763,00		138.435.952,00	

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	85	113.891.600,00	87.5	119.586.180,00	90	125.565.489,00	92.5	131.843.763,00	95	138.435.952,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					112.190.800,00		117.800.340,00		123.590.358,00		129.874.874,00		136.368.619,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	85	89.495.400,00	87.5	93.970.170,00	90	98.568.679,00	92.5	103.602.112,00	95	108.782.218,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	85	22.695.400,00	87.5	23.830.170,00	90	25.021.679,00	92.5	26.272.762,00	95	27.586.401,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					300.777.000,00		315.815.850,00		331.606.643,00		348.186.975,00		365.596.323,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	85	300.777.000,00	87.5	315.815.850,00	90	331.606.643,00	93	348.186.975,00	95	365.596.323,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					212.027.500,00		222.628.875,00		233.760.319,00		245.448.334,00		257.720.752,00	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Rejoso	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	85	85	100	48.375.000,00	100	50.793.750,00	100	53.333.438,00	100	56.000.109,00	100	58.800.115,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rejoso	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	85	85	100	163.652.500,00	100	171.835.125,00	100	180.426.881,00	100	189.448.225,00	100	198.920.637,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4.318.649.857,00		4.534.582.350,00		4.761.211.470,00		4.999.377.039,00		5.249.345.893,00	

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Rejoso		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Rejoso		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rejoso		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rejoso		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rejoso		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Rejoso		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rejoso		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Meningkatnya tertib administrasi desa			Persentase Desa tertib administrasi desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Rejoso		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rejoso		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				4.318.649.857,00		4.534.582.350,00		4.761.311.470,00		4.999.377.039,00		5.249.345.893,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.456.022.757,00		3.628.823.895,00		3.810.265.090,00		4.000.778.344,00		4.200.817.261,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	61	63	3.456.022.757,00	66	3.628.823.895,00	68	3.810.265.090,00	70	4.000.778.344,00	72	4.200.817.261,00	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.968.900,00		43.017.346,00		45.168.212,00		47.426.624,00		49.797.955,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	7.234.450,00	2	7.596.173,00	2	7.975.981,00	2	8.374.780,00	2	8.793.519,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.234.450,00		7.596.173,00		7.975.981,00		8.374.780,00		8.793.519,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	7.234.450,00	2	7.596.173,00	2	7.975.981,00	2	8.374.780,00	2	8.793.519,00		
Tersusunnya Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	7.234.450,00	4	7.596.173,00	4	7.975.981,00	4	8.374.780,00	4	8.793.519,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.234.450,00		7.596.173,00		7.975.981,00		8.374.780,00		8.793.519,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	7.234.450,00	4	7.596.173,00	4	7.975.981,00	4	8.374.780,00	4	8.793.519,00		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.150.000,00	1	3.307.500,00	1	3.472.876,00	1	3.646.520,00	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				750.000,00		787.500,00		826.875,00		868.219,00		911.630,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	750.000,00	1	787.500,00	1	826.875,00	1	868.219,00	1	911.630,00	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				750.000,00		787.500,00		826.875,00		868.219,00		911.630,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	750.000,00	1	787.500,00	1	826.875,00	1	868.219,00	1	911.630,00	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				750.000,00		787.500,00		826.875,00		868.219,00		911.630,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	750.000,00	1	787.500,00	1	826.875,00	1	868.219,00	1	911.630,00	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				750.000,00		787.500,00		826.875,00		868.219,00		911.630,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	750.000,00	1	787.500,00	1	826.875,00	1	868.219,00	1	911.630,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	23.500.000,00	2	24.675.000,00	2	25.908.750,00	2	27.204.188,00	2	28.564.397,00	

Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi														
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23.500.000,00		24.675.000,00		25.908.750,00		27.204.188,00		28.564.397,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	23.500.000,00	2	24.675.000,00	2	25.908.750,00	2	27.204.188,00	2	28.564.397,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.779.431.500,00		2.918.403.075,00		3.064.323.229,00		3.217.539.390,00		3.378.416.359,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	19	2.779.431.500,00	19	2.918.403.075,00	19	3.064.323.229,00	19	3.217.539.390,00	19	3.378.416.359,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.737.861.000,00		2.874.754.050,00		3.018.491.753,00		3.169.416.340,00		3.327.887.157,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	19	2.737.861.000,00	19	2.874.754.050,00	19	3.018.491.753,00	19	3.169.416.340,00	19	3.327.887.157,00		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.800.000,00		1.890.000,00		1.984.500,00		2.083.725,00		2.187.911,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1.800.000,00	1	1.890.000,00	1	1.984.500,00	1	2.083.725,00	1	2.187.911,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14.170.500,00		14.879.025,00		15.622.976,00		16.404.125,00		17.224.331,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	14.170.500,00	1	14.879.025,00	1	15.622.976,00	1	16.404.125,00	1	17.224.331,00		

7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.600.000,00		26.880.000,00		28.224.000,00		29.635.200,00		31.116.960,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	25.600.000,00	13	26.880.000,00	13	28.224.000,00	13	29.635.200,00	13	31.116.960,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.800.000,00		1.890.000,00		1.984.500,00		2.083.725,00		2.187.911,00		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.800.000,00	1	1.890.000,00	1	1.984.500,00	1	2.083.725,00	1	2.187.911,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				800.000,00		840.000,00		882.000,00		926.100,00		972.405,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	800.000,00	1	840.000,00	1	882.000,00	1	926.100,00	1	972.405,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000,00		1.050.000,00		1.102.500,00		1.157.625,00		1.215.506,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14	14	1.000.000,00	14	1.050.000,00	14	1.102.500,00	14	1.157.625,00	14	1.215.506,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.150.000,00		40.057.500,00		42.060.375,00		44.163.394,00		46.371.563,00		
Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	38.150.000,00	20	40.057.500,00	20	42.060.375,00	20	44.163.394,00	20	46.371.563,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.300.000,00		26.565.000,00		27.893.250,00		29.287.913,00		30.752.308,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	25.300.000,00	2	26.565.000,00	2	27.893.250,00	2	29.287.913,00	2	30.752.308,00		

7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12.850.000,00		13.492.500,00		14.167.125,00		14.875.481,00		15.619.255,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	12.850.000,00	20	13.492.500,00	20	14.167.125,00	20	14.875.481,00	20	15.619.255,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				182.222.630,00		191.333.762,00		200.900.451,00		210.945.470,00		221.492.746,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	80.157.130,00	11	84.164.987,00	11	88.373.236,00	11	92.791.897,00	11	97.431.492,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.829.680,00		13.471.164,00		14.144.722,00		14.851.958,00		15.594.556,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	12.829.680,00	4	13.471.164,00	4	14.144.722,00	4	14.851.958,00	4	15.594.556,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000,00		17.850.000,00		18.742.500,00		19.679.625,00		20.663.606,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	17.000.000,00	11	17.850.000,00	11	18.742.500,00	11	19.679.625,00	11	20.663.606,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.327.450,00		52.843.823,00		55.486.014,00		58.260.314,00		61.173.330,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	50.327.450,00	11	52.843.823,00	11	55.486.014,00	11	58.260.314,00	11	61.173.330,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	102.065.500,00	2	107.168.775,00	2	112.527.215,00	1	118.153.573,00	1	124.061.254,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			

	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.577.500,00		3.756.375,00		3.944.194,00		4.141.403,00		4.348.474,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	11	3.577.500,00	11	3.756.375,00	11	3.944.194,00	11	4.141.403,00	11	4.348.474,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000,00		6.300.000,00		6.615.000,00		6.945.750,00		7.293.038,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	6.000.000,00	1	6.300.000,00	1	6.615.000,00	1	6.945.750,00	1	7.293.038,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.370.000,00		7.738.500,00		8.125.425,00		8.531.696,00		8.958.281,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	7.370.000,00	1	7.738.500,00	1	8.125.425,00	1	8.531.696,00	1	8.958.281,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79.543.000,00		83.520.150,00		87.696.158,00		92.080.965,00		96.685.014,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	79.543.000,00	3	83.520.150,00	3	87.696.158,00	3	92.080.965,00	3	96.685.014,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.575.000,00		5.853.750,00		6.146.438,00		6.453.759,00		6.776.447,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	5.575.000,00	2	5.853.750,00	2	6.146.438,00	1	6.453.759,00	1	6.776.447,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				149.412.594,00		156.883.224,00		164.727.385,00		172.963.754,00		181.611.942,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	149.412.594,00	6	156.883.224,00	6	164.727.385,00	6	172.963.754,00	6	181.611.942,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				6.644.850,00		6.977.093,00		7.325.947,00		7.692.244,00		8.076.857,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	6.644.850,00	5	6.977.093,00	5	7.325.947,00	5	7.692.244,00	5	8.076.857,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.767.744,00		149.906.131,00		157.401.438,00		165.271.510,00		173.535.085,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	142.767.744,00	6	149.906.131,00	6	157.401.438,00	6	165.271.510,00	6	173.535.085,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89.088.000,00		93.540.300,00		98.217.315,00		103.128.181,00		108.284.590,00		

Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	89.088.000,00	1	93.540.300,00	1	98.217.315,00	1	103.128.181,00	1	108.284.590,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				44.138.000,00		46.342.800,00		48.659.940,00		51.092.937,00		53.647.584,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	44.138.000,00	1	46.342.800,00	1	48.659.940,00	1	51.092.937,00	1	53.647.584,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.950.000,00		47.197.500,00		49.557.375,00		52.035.244,00		54.637.006,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	44.950.000,00	2	47.197.500,00	2	49.557.375,00	2	52.035.244,00	2	54.637.006,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.949.133,00		183.698.688,00		192.883.623,00		202.527.806,00		212.654.195,00	
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	174.949.133,00	3	183.698.688,00	3	192.883.623,00	3	202.527.806,00	3	212.654.195,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				31.264.033,00		32.827.235,00		34.468.596,00		36.192.026,00		38.001.628,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	31.264.033,00	3	32.827.235,00	3	34.468.596,00	3	36.192.026,00	3	38.001.628,00	
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				3.500.000,00		3.675.000,00		3.858.750,00		4.051.688,00		4.254.272,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5	3.500.000,00	5	3.675.000,00	5	3.858.750,00	5	4.051.688,00	5	4.254.272,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.930.000,00		11.476.500,00		12.050.325,00		12.652.841,00		13.285.483,00	

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	10.930.000,00	6	11.476.500,00	6	12.050.325,00	6	12.652.841,00	6	13.285.483,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				129.255.100,00		135.719.953,00		142.505.952,00		149.631.251,00		157.112.812,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	129.255.100,00	4	135.719.953,00	4	142.505.952,00	4	149.631.251,00	4	157.112.812,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				123.740.200,00		129.927.210,00		136.423.571,00		143.244.749,00		150.406.986,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	87,5	17.240.800,00	90	18.102.840,00	92,5	19.007.982,00	95	19.958.381,00	97,5	20.956.300,00	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.240.800,00		18.102.840,00		19.007.982,00		19.958.381,00		20.956.300,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)		1	17.240.800,00	1	18.102.840,00	1	19.007.982,00	1	19.958.381,00	1	20.956.300,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.240.800,00		18.102.840,00		19.007.982,00		19.958.381,00		20.956.300,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)		1	17.240.800,00	1	18.102.840,00	1	19.007.982,00	1	19.958.381,00	1	20.956.300,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	85	20.595.400,00	87,5	21.625.170,00	90	22.706.429,00	92,5	23.841.750,00	95	25.033.837,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				20.595.400,00		21.625.170,00		22.706.429,00		23.841.750,00		25.033.837,00		
Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		1	20.595.400,00	1	21.625.170,00	1	22.706.429,00	1	23.841.750,00	1	25.033.837,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				20.595.400,00		21.625.170,00		22.706.429,00		23.841.750,00		25.033.837,00		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		1	20.595.400,00	1	21.625.170,00	1	22.706.429,00	1	23.841.750,00	1	25.033.837,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	85	85.904.000,00	87,5	90.199.200,00	90	94.709.160,00	92,5	99.444.618,00	95	104.416.849,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				85.904.000,00		90.199.200,00		94.709.160,00		99.444.618,00		104.416.849,00		
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	85.904.000,00	1	90.199.200,00	1	94.709.160,00	1	99.444.618,00	1	104.416.849,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				80.000.000,00		84.000.000,00		88.200.000,00		92.610.000,00		97.240.500,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	5	80.000.000,00	5	84.000.000,00	5	88.200.000,00	5	92.610.000,00	5	97.240.500,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.904.000,00		6.199.200,00		6.509.160,00		6.834.618,00		7.176.349,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	5.904.000,00	1	6.199.200,00	1	6.509.160,00	1	6.834.618,00	1	7.176.349,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				113.891.600,00		119.586.180,00		125.565.489,00		131.843.763,00		138.435.952,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	85	113.891.600,00	87,5	119.586.180,00	90	125.565.489,00	92,5	131.843.763,00	95	138.435.952,00	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso	

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				113.891.600,00		119.586.180,00		125.565.489,00		131.843.763,00		138.435.952,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	84.446.200,00	1	88.668.510,00	1	93.101.936,00	1	97.757.032,00	1	102.644.884,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				84.446.200,00		88.668.510,00		93.101.936,00		97.757.032,00		102.644.884,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	84.446.200,00	1	88.668.510,00	1	93.101.936,00	1	97.757.032,00	1	102.644.884,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	29.445.400,00	6	30.917.670,00	6	32.463.553,00	6	34.086.731,00	6	35.791.068,00		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				29.445.400,00		30.917.670,00		32.463.553,00		34.086.731,00		35.791.068,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	29.445.400,00	6	30.917.670,00	6	32.463.553,00	6	34.086.731,00	6	35.791.068,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				112.190.800,00		117.800.340,00		123.690.358,00		129.874.874,00		136.368.619,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	85	22.695.400,00	87,5	23.830.170,00	90	25.021.679,00	92,5	26.272.762,00	95	27.586.401,00	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				22.695.400,00		23.830.170,00		25.021.679,00		26.272.762,00		27.586.401,00		

Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	4	22.695.400,00	4	23.830.170,00	4	25.021.679,00	4	26.272.762,00	4	27.586.401,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				22.695.400,00		23.830.170,00		25.021.679,00		26.272.762,00		27.586.401,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	4	22.695.400,00	4	23.830.170,00	4	25.021.679,00	4	26.272.762,00	4	27.586.401,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	85	89.495.400,00	87,5	93.970.170,00	90	98.668.679,00	92,5	103.602.112,00	95	108.782.218,00		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				89.495.400,00		93.970.170,00		98.668.679,00		103.602.112,00		108.782.218,00		
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	89.495.400,00	1	93.970.170,00	1	98.668.679,00	1	103.602.112,00	1	108.782.218,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				89.495.400,00		93.970.170,00		98.668.679,00		103.602.112,00		108.782.218,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	89.495.400,00	1	93.970.170,00	1	98.668.679,00	1	103.602.112,00	1	108.782.218,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				300.777.000,00		315.815.850,00		331.606.643,00		348.186.975,00		365.596.323,00		

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rejoso	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	85	300.777.000,00	87,5	315.815.850,00	90	331.606.643,00	92,5	348.186.975,00	95	365.596.323,00	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				300.777.000,00		315.815.850,00		331.606.643,00		348.186.975,00		365.596.323,00		
Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500	500	300.777.000,00	500	315.815.850,00	500	331.606.643,00	500	348.186.975,00	500	365.596.323,00		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300.777.000,00		315.815.850,00		331.606.643,00		348.186.975,00		365.596.323,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500	500	300.777.000,00	500	315.815.850,00	500	331.606.643,00	500	348.186.975,00	500	365.596.323,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				212.027.500,00		222.628.875,00		233.760.319,00		245.448.334,00		257.720.752,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Rejoso	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	85	100	48.375.000,00	100	50.793.750,00	100	53.333.438,00	100	56.000.109,00	100	58.800.115,00	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso	

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				212.027.500,00		222.628.875,00		233.760.319,00		245.448.334,00		257.720.752,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2	2	48.375.000,00	2	50.793.750,00	2	53.333.438,00	2	56.000.109,00	2	58.800.115,00		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				48.375.000,00		50.793.750,00		53.333.438,00		56.000.109,00		58.800.115,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2	2	48.375.000,00	2	50.793.750,00	2	53.333.438,00	2	56.000.109,00	2	58.800.115,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rejoso	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	85	100	163.652.500,00	100	171.835.125,00	100	180.426.881,00	100	189.448.225,00	100	198.920.637,00		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				212.027.500,00		222.628.875,00		233.760.319,00		245.448.334,00		257.720.752,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	5	163.652.500,00	5	171.835.125,00	5	180.426.881,00	5	189.448.225,00	5	198.920.637,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				163.652.500,00		171.835.125,00		180.426.881,00		189.448.225,00		198.920.637,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	5	163.652.500,00	5	171.835.125,00	5	180.426.881,00	5	189.448.225,00	5	198.920.637,00		

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama 9IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan , maka Kecamatan Rejoso menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Rejoso yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Rejoso terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
a. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Rejoso									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	50,5	55	60	62	64	66	68	
3.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	18,8	18,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
4.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	90	90	92	94	96	98	100	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	91,54	91,54	92	92,5	93	93,5	94	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

TABEL DAFTAR SUB KEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rejoso	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	positif	Nilai	50,5	50,5	60	62	64	68	70	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Rejoso.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001